

Peta Kekuatan Politik Hasil Pemilu 2009

Lili Romli

Abstract

The 2009 election has resulted a map of political change of the election winner. The winner of the 2004 election was Golkar Party, while in the 2009 election, the winner was Democrat Party. The 2009 election became a "punishment" for old parties, like Golkar, PDIP and PPP since their votes were decreasing sharply compare to previous election. Meanwhile, two new parties, Gerindra and Hanura, had successfully entered Senayan (parliament) by defeating previous parties that had existed in the parliament. The Islamic Parties with their Islamic basis mass, except PKS, has failed to get electoral support due to their decreasing votes or did not pass the electoral threshold. This also happened to nationalist parties and christian basis mass parties.

PENDAHULUAN

Pada era reformasi ini, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu secara demokratis dan berkala setiap lima tahun sekali. Pemilu pertama era reformasi dilaksanakan pada 1999 dengan peserta pemilu sebanyak 48 parpol. Pemilu kedua diselenggarakan pada 2004 dengan kontestan sebanyak 24 parpol. Jumlah peserta pemilu kali ini mengalami penurunan separuh dari jumlah peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 1999). Pada Pemilu 2009 jumlah peserta pemilu mengalami kenaikan dengan jumlah kontestan sebanyak 38 parpol. Selain itu, pada pemilu ini terdapat juga partai politik lokal di Aceh yang ikut menjadi peserta pemilu untuk memperebutkan kursi di DPRD seprovinsi Aceh.

Mengamati konfigurasi hasil pemilu cukup menarik untuk dianalisis. Hal ini disebabkan, pada pemilu-pemilu era reformasi ini pemenang pemilu selalu berganti. Pada Pemilu 1999, pemenang pemilu di tangan PDIP, partai pimpinan Mergawati Soekarnoputri, yang pada masa Orde Baru gigih melakukan perlawanan terhadap rezim. Pemilu 2004 yang menjadi pemenang pemilu Partai Golkar, partai warisan dan pendukung utama rezim Orde Baru, menggantikan PDIP. Pola berganti pemenang pemilu itu berlanjut pada Pemilu 2009 di mana yang menjadi pemenang pemilu adalah Partai Demokrat, partai baru yang mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono.

Tidak seperti pada pemilu-pemilu Orde Baru yang hasil atau pemenang pemilu sudah diketahui, peta kekuatan yang tidak berubah dengan Golkar sebagai pemenang pemilu dan menjadi kekuatan mayoritas mutlak di DPR. Sementara dua partai lainnya, PPP dan PDI, harus puas dengan posisi kedua dan ketiga dengan perolehan suara yang kecil dan jauh di bawah Golkar.

Kondisi seperti itu tidak sama dengan pemilu-pemilu era reformasi. Pemilu era reformasi cenderung menghasilkan peta kekuatan politik di parlemen (DPR) yang selalu berubah. Pemilu era reformasi cenderung memunculkan peta kekuatan baru di parlemen. Pemilu 1999, yang diikuti oleh 48 parpol, yang keluar sebagai pemenang pemilu adalah PDIP dengan perolehan suara 33,74%. PDIP sebagai pemenang pemilu ini, dengan demikian telah menggeser kekuatan Golkar yang selama Orde Baru menjadi kekuatan tunggal di parlemen. Selain itu, hasil Pemilu 1999 juga memunculkan kekuatan-kekuatan politik baru di parlemen, yaitu PKB, PAN, PK, dan PBB, Partai-partai tersebut merupakan partai yang dibentuk era reformasi.

Pemilu 2004 dengan jumlah peserta pemilu sebanyak 24 parpol, Golkar yang pada Pemilu 1999 mengalami kekalahan, menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh suara 21,58%, sementara PDIP menempati urutan kedua (18,53%). Pemilu 2004 juga memunculkan kekuatan politik baru di parlemen dengan kehadiran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan

Partai Demokrat (PD). Kedua partai ini memperoleh suara cukup signifikan, di mana PKS memperoleh suara 7,45% dan PD mendapat 7,45%

Pemilu 2009 diikuti oleh 44 parpol, yang terdiri atas 38 parpol di tingkat nasional dan 6 parpol lokal di Aceh.¹ Seperti juga pada hasil pemilu sebelumnya, hasil Pemilu 2009 juga memunculkan perubahan peta kekuatan politik di parlemen (DPR). Jika hasil pemilu sebelumnya kekuatan politik di parlemen didominasi oleh Partai Golkar dan PDIP, maka pada Pemilu 2009 muncul kekuatan politik baru, yakni Partai Demokrat (PD). PD tampil sebagai pemenang pemilu dengan, menggeser Partai Golkar (2004) dan PDIP (1999).

TIPOLOGI PARPOL PEMILU 2009

Pertumbuhan dan perkembangan parpol di Indonesia sebenarnya sudah dimulai pada masa pergerakan. Pada masa itu, kaum pergerakan mendirikan parpol sebagai instrumen perjuangan bagi pembebasan Indonesia dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1946, secara resmi berdirilah partai-partai politik di Indonesia. Sebagian parpol merupakan kelanjutan dari parpol yang didirikan pada masa pergerakan, seperti PNI dan PKI.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan parpol di Indonesia mengalami pasang dan surut. Pada awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an, partai politik di Indonesia begitu banyak sehingga disebutnya sebagai zaman partai-partai. Memasuki Demokrasi Terpimpin merupakan masa surut partai-partai politik. Dari segi jumlah mengalami penciutan, di mana hanya ada 10

partai politik yang boleh eksis. Dari segi peran, mereka hanya menjadi “pelengkap penderita” semua kekuasaan terkonsentrasi pada Soekarno.

Kondisi seperti itu berlanjut pada era Orde Baru, bahkan lebih buruk lagi. Jumlah partai politik dipangkas hanya dua parpol (PPP dan PDI) dan satu Golkar. Mereka semuanya harus berasaskan Pancasila. Peran partai politik sama seperti era Demokrasi Terpimpin, tidak memiliki peran apa-apa karena kekuasaan terkonsentrasi pada Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru. Meski Golkar dalam setiap pemilu selalu menang, tapi ia hanya sebagai mesin politik penguasa.

Era reformasi, partai politik mengalami pasang. Pasca-jatuhnya Soeharto, Indonesia kembali memasuki era multipartai. Pada masa ini setiap kelompok atau golongan membentuk dan/atau mendirikan partai politik. Menjelang Pemilu 1999 jumlah partai politik yang didirikan sekitar 181 partai, Pemilu 2004 ada 237 partai politik yang didirikan, dan menjelang Pemilu 2009 jumlah partai politik yang dibentuk sekitar 132 partai.

Parpol-parpol yang didirikan dan yang mengikuti pemilu tersebut merupakan bagian dari representasi ideologi, atau dalam bahasa Feith aliran politik yang ada di Indonesia. Dalam konteks itu, Feith dan Castle lalu mengelompokkan aliran-aliran politik yang ada di Indonesia atas lima aliran politik, yaitu Islam, Nasionalisme Radikal, Komunisme, Sosialisme Demokrat, dan Tradisionalisme Jawa.²

Pengelompokan aliran-aliran politik itu yang kemudian kerap menjadi alat analisis tentang peta kekuatan parpol di Indonesia, ketika Indonesia memasuki era multi partai pada era reformasi ini. Konteks era reformasi sebagai unit analisis karena pada masa sebelumnya, yakni masa Orde Baru, tidak bisa dijadikan representasi politik aliran karena terjadi deparpolisasi dan deideologisasi. Jumlah parpol harus tiga (Golkar, PPP, dan PDI) dan harus semuanya berasaskan Pancasila.

Daniel Dhakidae, dalam menganalisis tentang peta kekuatan parpol era reformasi tetap berlandaskan pada peta yang disampaikan oleh Feith sebagai basis analisisnya. Meskipun demikian, Dhakidae, mencoba menawarkan bentuk pengelompokan partai-partai politik Pasca Orde Baru ini atas dua jalur utama, yaitu jalur

¹ Keenam parpol lokal Aceh tersebut adalah PDA, Partai SIRA, PRA, Partai Aceh (PA), PBA, dan PAAS. Dibandingkan dengan Pemilu 2004, jumlah peserta Pemilu 2009 mengalami kenaikan yang cukup banyak, yaitu sebanyak 14 parpol untuk tingkat nasional. Di sini tampaknya pemberlakuan *electoral threshold* (ET) 3% tidak mampu membendung laju pertumbuhan dan pembentukan partai-partai baru. Analisis yang diajukan tentang banyaknya jumlah peserta Pemilu 2009, selain kegagalan ET mencegah kehadiran partai-partai baru, faktor yang turut serta menyebabkan banyaknya jumlah peserta pemilu adalah inkonsistensi regulasi pemilu yang membolehkan parpol yang memperoleh kursi di DPR, meski tidak sampai mencapai ET 3%, dapat mengikuti Pemilu 2009 tanpa perlu adanya verifikasi oleh KPU. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol-parpol baru cenderung lemah sehingga parpol yang seharusnya tidak layak ikut pemilu dapat lolos menjadi peserta pemilu, juga menjadi faktor yang turut andil menyumbang banyaknya jumlah peserta pemilu.

² Lihat Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988).

kelas dan jalur aliran.³ Dengan demikian, selain tetap mengacu pada pendapat Feith, Dhakidae menyodorkan tesis baru berdasarkan pengelompokan jalur kelas. Menurutnya, parpol yang mengambil jalur kelas membedakan dirinya berdasarkan pandangannya terhadap modal, yang pada akhirnya membagi masyarakat atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala kompleksitasnya. Partai yang mengambil aliran akan membedakan dirinya berdasarkan pandangan terhadap dunia dan persoalannya dan bagaimana cara memecahkannya. Agama dan kebudayaan menjadi pilihannya.

Selanjutnya, Daniel menjelaskan bahwa partai-partai politik yang ikut Pemilu 1999 ada dua sumbu yang memisahkannya, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub, yaitu partai yang berdasarkan agama dan partai yang berdasarkan kebangsaan. Sumbu horizontal juga memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yaitu developmentalisme dan sosialisme radikal.

Dari sumbu vertikal menarik garis antara dua aliran yang berbeda, yaitu aliran yang berdasarkan agama: Islam dan Kristen. Partai yang berdasarkan agama ini tidak semata-mata karena fanatisme, tetapi salah satunya, adalah alasan praktis, yaitu agama apa pun akan dengan mudah menyatukan pendukungnya secara ke dalam. Kelompok Islam, misalnya akan dengan mudah mengidentifikasi dirinya dengan umat Islam dan dengan demikian dengan sendirinya akan mencari dukungan dengan umat Islam. Demikian pula dengan kelompok Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Pada pasca Orde Baru ini banyak partai-partai politik yang mengatasnamakan agama Protestan maupun Katolik.

Kevin Evans juga mencoba mengelompokkan parpol-parpol pasca Orde Baru ini. Ia mengelompokkan partai politik atas dasar ideologis dan budaya politik. Berdasarkan itu ia kemudian membagi pengelompokan partai atas dua garis belahan, yaitu kiri-kanan, (horizontal) dan atas bawah (vertikal), di mana kiri merupakan kelompok partai-partai sekuler dan kanan merupakan kelompok partai-partai Islamis. Sebaliknya, garis vertikal ke atas merupakan

partai yang cenderung bersifat elitis dan garis ke bawah partai politik yang cenderung populis.⁴

Sementara Ikrar Nusa Bhakti dalam artikelnya di *Kompas*, yang berjudul "Kekuatan Parpol pada Pemilu 2009", mengatakan bahwa tipologi partai pada era reformasi ini mirip tipologi partai tahun 1950-an yang dikemukakan oleh Feith. Dalam konteks itu Ikrar mengelompokkan parpol atas dasar sosialis kiri, sosialis demokrat, nasionalis kerakyatan, nasionalis borjuis, Islam modernis, Islam tradisional, Islam sosialis, serta campuran sosialisme dan nasionalisme.⁵

Manakah parpol-parpol yang masuk dalam kategori pengelompokan yang dikemukakan oleh Ikrar tersebut? Ia menyebutkan bahwa Partai Buruh merupakan perwujudan dari sosialis kiri dan Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB) sebagai representasi dari sosialis demokrat. PDI-P, PDP, PNI Massa Marhaen, PNBKI sebagai nasionalis kerakyatan; dan Golkar, Hanura, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Barnas sebagai nasionalis borjuis. Sementara parpol yang masuk dalam kategori Islam modernis adalah PAN, PMB, PKS, PBB dan separuh PPP; Islam dan Sosialis (PBR); Islam tradisional (PKB, PNU); separuh PPP plus partai beraliran NU; partai-partai kecil beraliran campuran, sosialisme dan nasionalisme.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, lalu bagaimana sesungguhnya peta aliran politik atau ideologi parpol-parpol era reformasi ini, khususnya parpol pada Pemilu 2009? Tidak mudah memang untuk mengelompokkan secara rigid dari parpol-parpol era reformasi ini karena terjadi konvergensi antara partai politik yang satu dengan yang lain. Umumnya parpol-parpol yang ada berusaha mencakup semua golongan (*catch all party*), khususnya partai-partai non-agama yang dalam program dan aksinya berusaha mengakomodir kelompok-kelompok agama. Sebut saja misalnya, dalam PDIP ada Baitul Mal, di Partai Golkar ada Alhidayah (dulu Satkar Ulama), di PD ada Majelis Zikir Nursalam. Begitu juga dengan partai-partai non agama kecil lainnya. Selain itu juga, orang-orang dari Muhammadiyah, NU, dan HMI banyak yang masuk dalam parpol-parpol tersebut. Setiap partai

³ Daniel Dhakidae, *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 34.

⁴ Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Arise Consultancies, 2003), hlm. 11.

⁵ Ikrar Nusa Bhakti, "Kekuatan Parpol pada Pemilu 2009", *Kompas*, 8 September 2008.

⁶ *Ibid.*

ada tokoh pentolan dari masing-masing unsur kekuatan Islam tersebut.

Sementara dari kelompok-kelompok Islam sendiri, ternyata tidak semua kelompok Islam setuju mendirikan partai yang berasaskan Islam. Dari kalangan NU, misalnya arus utama yang muncul perlu mendirikan parpol pluralis yang mewadahi dan melindungi semua golongan-golongan yang ada di Indonesia. Dalam konteks itu mereka kemudian mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun demikian sebagian dari kalangan NU tetap perlu mengusung Islam, maka berdirilah PPNU dan PKNU. Di kalangan Muhammadiyah juga seperti itu, selain ada PAN yang bersifat pluralis ada juga Partai Matahari Bangsa (PMB) yang berideologikan Islam.

Atas dasar itu, pengelompokan aliran politik yang dikemukakan oleh Feith sedikit banyak masih bisa menggambarkan tentang peta aliran-aliran politik pada era reformasi ini. Dan tetap masing-masing aliran politik tersebut, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersinggungan dan memengaruhi. Namun, peta aliran politik saat ini tidak se-*rigid* seperti pada tahun 1950-an.

Bila pada tahun 1950-an, aliran-aliran politik tersebut terlihat jelas dalam bentuk pertentangan ideologi, tidak demikian dengan pada era reformasi ini. Kalaupun masih ada, pada saat ini adalah dikotomi antara Islam dan nasionalis dalam bentuk asas partai. Dari kalangan Islam, pada awal reformasi, memang semula ingin memperjuangkan kembali Piagam Jakarta seperti yang dilakukan oleh PBB dan PPP.⁷ Usaha perjuangan piagam ini gagal, bukan saja karena ditolak oleh partai-partai nasionalis dan partai Islam pluralis, kalangan Islam sendiri banyak yang tidak setuju terhadap perjuangan Piagam Jakarta seperti yang ditunjukkan oleh sikap NU dan Muhammadiyah yang menolak dan mengancam partai-partai yang ingin mengembalikan Piagam Jakarta. Partai Keadilan (PK), yang merupakan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebuah partai yang berasaskan Islam dan dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin, tidak setuju dengan perjuangan Piagam Jakarta.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, arus utama dari aliran-aliran politik di Indonesia, tetap

mengacu pada tipologi yang diajukan oleh Feith, Namun, seiring dengan perkembangan, tidak semua aliran-aliran politik mendapat dukungan riil dari masyarakat lewat pemilu, maka arus utama yang muncul dan kuat di masyarakat adalah dua aliran politik, yaitu Islam dan Nasionalis. Tidak seperti Feith, saya membagi aliran Islam atas Islam Formalis dan Islam Pluralis. Islam formalis terdiri atas parpol Islam yang berasas Islam (PPP, PKS, PBB, PMB, PBR, PKNU), dan Islam pluralis, yaitu partai yang berbasis massa Islam dengan Pancasila sebagai asas politiknya, yang masuk dalam kategori ini adalah PKB dan PAN.

Sementara dari unsur nasionalis terbagi atas Nasionalis Kerakyatan dan Nasionalis Borjuis. Nasionalis kerakyatan adalah parpol yang memiliki kebijakan dan membela kepentingan *wong cilik*. Partai seperti PDIP, Hanura, dan Gerindra masuk dalam kategori partai Nasionalis kerakyatan, sedangkan Nasionalis borjuis adalah partai yang cenderung dekat dengan kaum kapital (pemilik modal) dan pasar bebas. Partai Golkar dan Partai Demokrat cenderung masuk dalam kategori Nasionalis liberal.

Di luar arus utama tersebut, memang masih ada aliran-aliran politik lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Ikrar Nusa Bhakti di atas, yaitu aliran politik sosialis, yang terbagi atas sosialis kiri (Partai Buruh) dan sosialis demokrat (PPIB). Kelompok agama Kristen juga masih perlu diperhitungkan, meski ideologinya cenderung dekat dengan aliran nasionalis, terutama sikap terhadap Pancasila sebagai harga mati bagi kelompok ini.

PETA POLITIK HASIL PEMILU 2009

Sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, peta politik hasil Pemilu 2009 juga mengalami perubahan atau pergeseran. Apabila pada Pemilu 2004, yang keluar sebagai pemenang adalah Golkar, kini Pemilu 2009 yang keluar sebagai pemenang adalah Partai Demokrat (PD) dengan mendulang suara sebanyak 20,85%. Pada Pemilu 2009 ini Golkar tidak mampu mempertahankan posisinya, ia berada di posisi kedua dengan meraih suara sebanyak 14,45%. Posisi ketiga ditempati oleh PDIP dengan mendapat suara 14,03%. Urutan selanjutnya ditempati oleh PKS dengan suara 7,88%; PAN 6,44%; PPP 5,32%; PKB 4,94%; Gerindra 4,46%; dan Hanura 3,77%.

⁷ Lihat Lili Romli, *Islam Yes, Partai Islam Yes*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

⁸ *Ibid.*

Kemenangan PD pada Pemilu 2009 ini memang sudah diprediksi oleh berbagai lembaga survei. Beberapa lembaga survei memprediksi bahwa PD akan memenangkan Pemilu 2009, seperti yang disinyalir oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) maupun oleh survei bersama yang dilakukan oleh CSIS, LIPI, LP3ES, dan Puskapol FISIP UI.

Kenaikan perolehan suara yang diperoleh PD luar biasa, naik 300% dari pemilu sebelumnya. Sebagai partai yang baru dua kali ikut pemilu, ia mampu keluar sebagai pemenang pemilu, mengalahkan dan menggeser kekuatan politik dominan yang selama ini menguasai DPR. PD mampu melipatgandakan kenaikan suaranya sebanyak tiga kali lipat dari Pemilu 2004, dari sekitar tujuh persen menjadi lebih dari 20%.

Dengan infrastruktur yang masih lemah, belum tersebar dan merata sampai tingkat kecamatan dan desa, PD keluar sebagai pemenang pemilu, mengalahkan Golkar dan PDIP, yang infrastruktur kuat dan lengkap di seluruh Indonesia. Lalu, apa faktor penyebabnya sehingga PD bisa menang dalam Pemilu 2009? Di antara yang menjadi faktor kemenangan PD tidak lepas dari peran figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Fenomena kemenangan ini merupakan kelanjutan dari kisah sukses PD pada Pemilu 2004. PD sebagai pendatang baru dalam blantika perpolitikan nasional mendapat dukungan suara yang fenomenal pada Pemilu 2004, yaitu sebesar 7,45%. Dengan perolehan suara sebanyak itu ia sejajar dengan partai-partai papan tengah lainnya, seperti PAN, PKB, PPP, dan PKS. Fenomena PD pada Pemilu 2004 tersebut tidak lepas dari nilai jual SBY, yang saat itu dicitrakan sebagai orang yang terzalimi akibat diberhentikan oleh Presiden Megawati sebagai Menko Polkam. Politik terzalimi ini menghasilkan dukungan yang besar bagi perolehan suara PD.⁹

Tampaknya sejarah berulang kembali, dan sejarah itu cukup fenomenal. Seperti dikatakan di atas, hasil Pemilu 2009 menghantarkan PD

sebagai pemenang. Lagi-lagi, penjelasan yang muncul bahwa faktor kemenangan PD tidak lepas dari SBY itu sendiri. Dominannya faktor SBY bagi PD dalam memenangkan Pemilu 2009 memunculkan *joke* bahwa PD menang karena tiga faktor, yaitu “pertama, faktor Susilo; kedua, faktor Bambang; dan ketiga, faktor Yudhoyono”.

PD sungguh beruntung memiliki figur SBY meskipun bukan sebagai ketua umum partai (Ketua Umum PD adalah Hadi Utomo. Selama ini jangan-jangan, masyarakat awam menganggap SBY sebagai Ketua Umum PD dan tidak tahu banyak tentang posisi Hadi Utomo sebagai Ketua Umum PD), masyarakat mengenalnya sebagai representasi tunggal PD. SBY=PD dan PD=SBY. Dengan demikian, SBY dan PD adalah *loro-loro ing tunggal*, keduanya sama, tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks itu tidak heran apabila dalam kampanye-kampanye dan iklan-iklan PD selalu mengusung figur SBY, bukan yang lain. Bukan hanya PD, para caleg PD kerap numpang populer pada SBY. Perhatikan iklan atau spanduk-spanduk para caleg PD, di belakang mereka kerap ada gambar SBY. Figur SBY sungguh luar biasa, ia mampu “menghipnotis” konstituen.

“Politik pencitraan” yang dibangun dan ditambah dengan masa tahun-tahun terakhir periode pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan populis di tengah-tengah masyarakat yang didera pengangguran dan kemiskinan akibat dampak krisis ekonomi, mendorong popularitas SBY dan PD. Kebijakan menurunkan tiga kali berturut-turut harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kebijakan PNBM, Raskin, dan Sekolah Gratis, membuat sebagian besar masyarakat, terutama kalangan *grass root* merasa senang dan bahagia dengan kebijakan tersebut. Politik pencitraan dan kebijakan populis, akhirnya menghasilkan *output* yang luar biasa bagi SBY dan PD.

Pergeseran peta kekuatan politik juga terjadi pada partai-partai Islam dan berbasis massa Islam. Partai-partai Islam, kecuali PKS, mengalami penurunan suara. Begitu juga dengan partai berbasis massa Islam. Keinginan partai Islam menjadi pemenang pemilu belum juga terlaksana. Alih-alih mencapainya, partai Islam dan berbasis massa Islam cenderung mejadi partai “papan tengah”. Dengan kondisi tersebut, sulit rasanya partai Islam dan berbasis massa Islam untuk berperan signifikan dalam proses dinamika politik di parlemen.

⁹ Sukses PD mendulang suara ini melenggangkan pencalonan SBY sebagai presiden dalam Pilpres 2004. Didukung bersama PBB dan PKPI, PD mencalonkan SBY dan M. Jusuf Kalla (JK) sebagai pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2004 melawan *incumbent*, Megawati yang berpasangan dengan Hasyim Muzadi dan kandidat lainnya, Amien Rais-Siswono Yudho Husodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Pada putaran kedua, akhirnya SBY-JK mampu mengalahkan sang *incumbent* dengan memperoleh dukungan di atas 60% suara.

Tabel 1. Perolehan Partai Politik Hasil Pemilu 1999, 2004, dan 2009

No	Nama Partai	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009
1	Partai Demokrat	-	7,45%	20,85%
2	Partai Golkar	22,4%	21,58%	14,45%
3	PDIP	33,7%	18,53%	14,03%
4	PKS	1,4%	7,34%	7,88%
5	PAN	7,1%	6,44%	6,01%
6	PPP	10,7%	8,15%	5,32%
7	PKB	12,6%	10,57%	4,94%
8	Partai Gerindra	-	-	4,46%
9	Partai Hanura	-	-	3,77%

Sumber: Diolah, 2009.

Pergeseran peta kekuatan politik juga terlihat dengan kehadiran dua partai baru, yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura. Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) dipimpin oleh Suhardi, tetapi partai ini menonjolkan ikon Prabowo Subianto, mantan Danjen Koppasus dan Pangkostrad, serta mantan menantu penguasa rezim Orde Baru, Soeharto. Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) langsung dipimpin oleh Jenderal Wiranto, mantan Pangab dan Menko Polkam. Dengan masing-masing mengusung ikon jenderal tersebut, kedua partai berhasil masuk Senayan (DPR), dengan memperoleh suara 4,46% untuk Partai Gerindra dan 3,77% bagi Partai Hanura. Sebagai partai baru yang langsung lolos *parliamentary threshold* (PT) 2,5% dan berhasil masuk parlemen, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Dukungan elektoral yang relatif signifikan ini tampaknya tidak lepas dari figur kedua jenderal tersebut yang menjadi magnet bagi kedua partai tersebut, selain iklan yang gencar yang ditayangkan oleh stasiun-stasiun TV.

Partai Gerindra dan Hanura tampaknya berhasil “mencuri” basis massa PDIP dan Partai Golkar. Dengan mengusung visi dan program membela dan memperjuangkan *wong cilik*, Partai Gerindra bisa menarik dukungan dari basis massa tradisional PDIP, sedangkan Partai Hanura bisa “menggembosi” basis Partai Golkar. Publik tahu bahwa Wiranto semula tokoh Golkar dan pada Pilpres 2004 maju sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar sehingga ketika Wiranto mendirikan partai bisa jadi sebagian massa Partai Golkar bermigrasi ke Partai Hanura.

KEGAGALAN PARTAI NASIONALIS

Apabila Pemilu 2009 memberikan keuntungan yang luar biasa bagi PD, tidak demikian dengan partai-partai lainnya. Selain

PKS, semua parpol peserta Pemilu 2004 yang sekarang menjadi peserta Pemilu 2009 menderita dengan turunnya perolehan suara yang mereka dapatkan. Bagi parpol-parpol tersebut, Pemilu 2009 merupakan “pukulan telak” bagi mereka alih-alih memenuhi target suara yang dicanangkan, yang didapat justru penurunan suara secara signifikan. Bahkan beberapa partai politik hengkang dari parlemen karena tidak lolos *parliamentary threshold* (PT) 2,5%.¹⁰

Untuk menghadapi Pemilu 2009 Partai Golkar menargetkan 30% suara. Alih-alih bisa mencapai target yang dicanangkan tersebut, mempertahankan kemenanganpun tidak bisa dicapai. Seperti diketahui, Pemilu 2004 Golkar sebagai pemenang pemilu. Kini pada Pemilu 2009, trofi kemenangan tersebut lepas. Bukan hanya tidak bisa mempertahankan kemenangannya, suara yang diperoleh Partai Golkar turun secara signifikan, dari 20,85% menjadi 14,45%. Ia turun suaranya sekitar 6,40%. Selain Partai Golkar, PDIP juga mengalami penurunan suara. Sebagai partai oposisi, seharusnya perolehan suara PDIP naik tajam. Hasil Pemilu 2009, suara yang diperoleh partai yang dipimpin oleh Megawati ini hanya 14,03%, turun sekitar 4,50% dari pemilu sebelumnya (18,53%)

Fenomena menurunnya suara Golkar dan PDI-P sebenarnya sudah terjadi pada Pemilu 2004. PDI-P bahkan turun drastis, dari pemenang pertama pada Pemilu 1999, menjadi *runner up* pada Pemilu 2004. Sebaliknya, Golkar yang menjadi *runner up* pada Pemilu 1999 berhasil menjadi pemenang pada Pemilu 2004. Sebagian besar pemilih pada Pemilu 1999 dan 2004 memilih Golkar dan PDI-P, justru mulai dicuri dengan munculnya partai baru, khususnya PD dan partai-partai nasionalis lainnya sejak Pemilu 2004 yang lalu.

Penurunan suara Golkar memang sudah diduga sebelumnya oleh lembaga-lembaga survei. Beberapa lembaga survei memprediksi bahwa pada Pemilu 2009 nanti perolehan suara Partai Golkar akan turun. Survei yang dilakukan oleh LIPI, CSIS, LP3ES, dan Puskapol UI, misalnya, memprediksi bahwa perolehan suara Partai Golkar bakal turun. Turunnya perolehan suara

¹⁰ Pada Pemilu 2009 ini terdapat aturan di mana parpol yang tidak memenuhi ambang batas atau *parliamentary threshold* (PT) 2,5% tidak dapat mengirimkan wakilnya di parlemen. Lihat Pasal 202 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Partai Golkar dan PDIP pada Pemilu 2009 karena disebabkan larinya basis massa Partai Golkar ke PD, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Ketiga partai ini, seperti dijelaskan sebelumnya adalah parpol yang berbasis nasionalis. Dengan demikian, terjadi migrasi pemilih. Akan tetapi, migrasi tersebut tetap pada basis partai yang sama, yakni sama-sama partai nasionalis.

Konflik elite di kedua partai ini bisa juga menjadi penyebab terus menurunnya suara mereka pada Pemilu Pemilu 2004 dan 2009. Di PDIP, misalnya konflik internal yang menyebabkan perpecahan partai dengan keluarnya beberapa elit PDIP, seperti Roy B.B. Janis, Arifin Panigoro, Sophan Sophian (alm), dan Noviantika Nasution, yang kemudian membentuk Partai Pembaharuan Demokrasi (PDP) turut mengurangi basis massa PDIP. Akibat konflik internal beberapa elite PDIP keluar membentuk partai baru, seperti Dimiyati Hartono mendirikan PITA dan Erros Djarot membentuk PNBK. Sementara di tubuh Partai Golkar akibat dampak gesekan di antara elite atau ketidakcocokan dengan haluan pimpinan Partai Golkar, banyak elite-elite Golkar yang bermigrasi ke partai lain atau mendirikan partai, seperti berdirinya PKPB, PKPI, Hanura, dan Gerindra.

Selain itu, faktor figur, baik Mega dan Jusuf Kalla masih kalah dibandingkan dengan figur SBY. Figur Kalla, alih-alih mendongkrak suara Partai Golkar karena posisinya sebagai Wakil Presiden, ternyata tidak banyak memberikan nilai lebih Partai Golkar. Begitu juga dengan figur Megawati, tampaknya mulai menurun kharismanya. Sebagai figur dan simbol oposisi tidak mampu meraih simpati dan dukungan secara luas dari masyarakat Indonesia. Ia hanya didukung oleh massa loyalnya saja, yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, sebagai partai oposisi kurang dapat memanfaatkan momentum baik untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah melalui kader-kadernya di parlemen.¹¹

Bagaimana nasib partai-partai nasionalis lainnya? Hasil Pemilu 2009 menunjukkan bahwa banyaknya partai-partai nasionalis yang muncul tidak memiliki basis massa. Ini terlihat dari perolehan suara yang mereka dapatkan tidak mencapai dua digit, rata-rata nol koma sekian

sehingga muncul *joke* sebagai partai “desimal” atau partai “Nasakom”, nasibnya sama-sama nol koma.

KEGAGALAN PARTAI ISLAM

Turunnya suara partai-partai di atas dialami juga oleh partai-partai Islam. Menurunnya tingkat dukungan elektoral partai-partai Islam sudah diprediksi oleh lembaga-lembaga survei. Indo Barometer, misalnya dalam survei yang dilakukan pada bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa perolehan parpol Islam diprediksi relatif kecil. Dalam survei tersebut, perolehan PKS pada posisi 7,2%, sementara PPP pada posisi 2,3%. Hasil Pemilu 2009 menunjukkan bahwa prediksi para lembaga survei tidak jauh berbeda. Partai-partai Islam tetap menjadi partai tengah dan mengalami penurunan. Pada Pemilu 2009 ini partai-partai Islam memperoleh suara masing-masing, seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. Perolehan Suara Partai Islam pada Pemilu 2009

Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
PKS	8.206.955	7,88%
PPP	5.533.214	5,32%
PBB	1.864.752	1,79%
PKNU	1.527.593	1,47%
PBR	1.264.333	1,21%
PMB	414.750	0,40%

Sumber: KPU, 2009.

Dari enam partai politik Islam tersebut, ternyata yang lolos *parliamentary threshold* (PT) 2,5% hanya dua, yaitu PKS dan PPP, sedangkan empat partai Islam lainnya, yakni PBB, PKNU, PBR, dan PMB tidak lolos PT. Partai Islam yang naik suaranya, meskipun sedikit hanya PKS. Perolehan suara PKS yang relatif stabil, tidak mengalami penurunan tersebut, salah satu faktor penjelas adalah karena kaderisasi yang terus dilakukan. Jika perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 berasal dari *swing voters*, maka pada Pemilu 2009 ini perolehan suara PKS mayoritas berasal dari hasil kaderisasi dan simpatisan PKS. Mereka tentu saja tetap berasal dari basis massa partai-partai Islam. Fenomena “predatorisme” atau “kanibalisme” sesama partai Islam untuk kasus ini masih relevan.

¹¹ Moch. Nurhasim, “Hasil Pemilu 2009 dan Perubahan Peta Politik”, dalam <http://www.politik.lipi.go.id/index.php?option=com>

Pada Pemilu 2009, PPP mendapat suara sekitar kurang lebih 5,5%. Dengan demikian, ia mengalami penurunan sebanyak kurang lebih tiga persen dari Pemilu 2004 (8,15%). PPP mengalami penurunan, antara lain disebabkan karena partai ini selalu dirundung konflik internal dan tiadanya figur sentral yang layak dijual. Meskipun ada dua kader PPP duduk dalam kabinet, keduanya cenderung "sibuk" berseteru.

PBB yang pada Pemilu 2004 mendapat suara sekitar 2,62%, pada Pemilu 2009 ini mengalami penurunan. Meski PBB relatif tanpa konflik, tampaknya sepeninggal Yusril Ihza Mahendra yang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan digantikan oleh M.S. Kaban, PBB tidak memiliki ikon dan pamor. PBB cenderung tenggelam dalam peta perpolitikan seiring dengan mundurnya Yusril dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan tidak lolosnya PBB di DPR, para pengamat menyimpulkan bahwa PBB sebagai penerus "trah" Masyumi akan tenggelam dalam perpolitikan nasional.

PBR juga demikian. Partai yang lahir produk dari konflik internal PPP ini pada Pemilu 2004 dengan ikon K.H. Zaenuddin M.Z., sebagai kiai kondang dengan julukan kiai sejuta umat, memperoleh suara 2,44%. Pemilu 2009 ini tampaknya nasibnya sama dengan PBB, yaitu tidak lolos PT 2,5%. PBR meski berusaha merekrut kalangan aktivis gerakan dan cenderung kohesif pascakonflik internal di bawah kepemimpinan Bursah Zarnubi, tetap tidak mampu mempertahankan basis massanya.

PKNU merupakan partai Islam baru produk dari konflik internal PKB. Di bawah komando Khaerul Anam dan dibidani oleh para Kiai Langitan, ternyata umat Nahdhiyin tidak banyak memberikan dukungan kepada PKNU. Alih-alih bisa mengalahkan PKB, PKNU juga tidak lolos PT 2,5%. Tampaknya kharismatis kiai mengalami "krisis pengaruh" dengan rendahnya tingkat dukungan suara yang diperoleh oleh PKNU. Padahal, di dalam tubuh PKNU tidak sedikit kiai yang masuk di dalamnya.

Nasib yang sama juga dialami oleh PMB, yang juga tidak lolos PT 2,5%. Meski mengusung Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, sebagai ikon calon presiden dan mengklaim sebagai anak kandung dari Muhammadiyah, namun ia tetap tidak mampu menarik secara besar-besaran konstituen Muhammadiyah. Massa Muhammadiyah

tampaknya sebagian besar masih memberikan dukungan terhadap PAN.

Memang penurunan suara tidak hanya terjadi pada parpol Islam saja, partai-partai yang berbasis massa Islam juga mengalami penurunan, yaitu PAN dan PKB. PAN yang pada Pemilu 2004 memperoleh suara 6,44%, pada Pemilu 2009 mengalami penurunan suara menjadi 6,01%. Padahal, dalam menghadapi Pemilu 2009, partai di bawah kepemimpinan Sutrisno Bachir ini mencalonkan beberapa artis sebagai caleg PAN sebagai *vote getter* sebagai pendulang suara. Ternyata hasilnya tidak banyak berubah, PAN pascakepemimpinan Amien Rais kehilangan figur sentral sebagai daya tarik dan "layak jual, selain faktor berdirinya PMB yang juga ikut menggembosei suara PAN.

Sementara PKB, pascakonflik internal dengan dibentuknya PKNU dan keluarnya Gus Dur dari PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, perolehan suaranya juga merosot tajam, dari 10,57% menjadi 4,94%. Menurunnya suara PKB sudah diduga sebelumnya karena dengan tidak adanya Gus Dur sebagai ikon PKB dengan kharisma dan massa loyalnya, partai yang lahir dari rahim NU ini akan kehilangan figur sentral yang selama ini menjadi magnet PKB. Hampir sama dengan PD dan PDIP, PKB juga diidentikkan dengan figur, yakni figur Gus Dur. Maka ketika Gus Dur hengkang dari PKB, ia menjadi limbung, kehilangan pendukung loyalnya.

Berdasarkan pada pemaparan di atas yang menjelaskan tentang turunnya suara partai-partai Islam, pertanyaan yang muncul ke manakah larinya suara partai-partai Islam dan berbasis massa Islam tersebut? Pertanyaan ini diajukan karena tidak ada satu pun partai Islam atau partai yang berbasis massa Islam yang naik suaranya secara signifikan, apalagi keluar sebagai pemenang. Jawaban sementara, kemungkinan suara partai-partai Islam atau berbasis massa Islam berpindah ke Partai Demokrat (PD). Sementara menurunnya suara Partai Golkar dan PDIP kemungkinan beralih ke Partai Hanura dan Partai Gerindra. Memang untuk menjawab pertanyaan itu perlu ada penelitian khusus tentang migrasi suara partai-partai Islam tersebut. Terlepas dari itu, pertanyaan yang penting diajukan adalah apakah dengan menurunnya suara partai-partai Islam tersebut memberikan sinyal bahwa politik aliran sudah mati, seperti dikemukakan oleh R. William Liddle dan Saiful

Mujani. Dalam studinya mereka menyimpulkan bahwa politik aliran telah pudar.¹² Benarkah demikian?

Melihat kecenderungan terus menurunnya suara-suara partai-partai Islam, bisa jadi kesimpulan kedua ahli tersebut mendapat pembenaran. Tetapi penulis masih sangsi dengan pendapat tersebut. Jangan-jangan menurunnya suara-suara partai Islam ini terkait dengan kondisi infrastruktur masyarakat yang masih lemah di mana mereka masih bergelut dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Namun, bila kehidupan mereka telah mapan secara ekonomi, bisa jadi mereka akan kembali ke politik aliran. Seperti studi yang dilakukan oleh Dwight Y. King yang menyimpulkan bahwa politik aliran masih *viabile* pada tingkat *grassroot*.¹³

CATATAN PENUTUP

Kecenderungan turunnya tingkat elektoral partai-partai di atas, menunjukkan bahwa sesungguhnya alasan hidup berdirinya partai tersebut bukan dilandasi kepentingan basis massa, tetapi lebih pada kepentingan elite, yakni kepentingan jangka pendek para elite untuk menggapai kekuasaan. Partai didirikan dan dibentuk sebagai instrumen untuk ke tangga kekuasaan elite itu sendiri, yang tidak terkait dengan kepentingan massa (memperjuangkan aspirasi rakyat). Atau, para elite mengidap penyakit *megaloponia*, merasa besar sendiri, merasa sebagai tokoh yang populer sehingga mereka memanfaatkan kepopuleran itu untuk mendirikan partai politik dan ikut pemilu. Akan tetapi, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Partai yang mereka didirikan tidak didukung oleh rakyat.

Keberhasilan sejumlah partai baru meraup suara di ajang kontestasi tidak bisa dilepaskan dari peran ketokohan pemimpin partai tersebut. Ramlan Surbakti menyebutkan, titik terlemah parpol di Indonesia adalah rendahnya derajat kesisteman dalam suatu partai. Hal ini disebabkan oleh peran kepemimpinan partai lebih dominan daripada kedaulatan anggota dan juga

kepentingan faksi, kelompok lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi.¹⁴

Peran pemimpin dominan akan menimbulkan akibat buruk apabila sang pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya. Sebaliknya, peran dominan pemimpin menimbulkan akibat yang positif bila sang pemimpin menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam partai. Kegagalan parpol menjalankan peran ideal ini mendorong apatisme masyarakat terhadap parpol. Beragam survei menyimpulkan buruknya citra parpol di mata publik. Apatisme telah mempertebal jarak dan memperlonggar ikatan parpol terhadap pemilihnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterikatan, terutama ikatan ideologi, antara pemilih dan partainya di Indonesia masih sangat lemah. Di sisi lain, pilihan publik lebih banyak didorong oleh peran ketokohan atau figur.¹⁵

Kerap terjadinya pergeseran peta kekuatan politik menunjukkan pula bahwa ternyata partai-partai politik di Indonesia belum kuat dan mengakar di masyarakat. Setiap pemilu selalu terjadi pergeseran secara signifikan peta kekuatan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa partai politik tersebut belum melakukan rekrutmen anggota dan kaderisasi secara simultan dan ajeg. Selain itu, di kalangan massa terjadi migrasi para pemilih, dari satu partai ke partai lainnya. Adanya migrasi pemilih ini menunjukkan bahwa para pemilih di Indonesia masih cair, tidak memiliki *Party ID*. Akibatnya tidak ada loyalitas tunggal terhadap partai tersebut, kecuali untuk beberapa partai saja, seperti PDIP dan PKS. Hasil suara yang diperoleh partai-partai politik dalam setiap pemilu merupakan indikator sejauh mana partai politik tersebut mendapat dukungan yang riil dari basis massa atau konstituennya. Apabila partai politik secara terus-menerus mampu bertahan sebagai pemenang pemilu atau tetap memperoleh suara secara signifikan menunjukkan bahwa partai politik tersebut mengakar dan kuat basis massanya.

¹² Burhanuddin Muhtadi, "Prospek Partai-Partai Islam dalam Pemilu 2009", <http://islamlib.com/id/artikel/prospek-partai-partai-islam-dalam-pemilu-2009/>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Suwardiman, "Partai Politik: Parpol Baru, yang Bertahan dan yang Tersingkir", dalam *Kompas*, Rabu, 1 Juli 2009.

¹⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, Ikrar Nusa. 2008. "Kekuatan Parpol Pada Pemilu 2009", *Kompas*, 8 September 2008.
- Dhakidae, Daniel. 1999. "Partai Politik di Indonesia", dalam Tim Litbang Kompas, *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*. Jakarta: Kompas.
- Evans, Kevin Raymond. 2003. *Sejarah Pemilu dan partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Arise Consultancies.
- Feith, Herbert dan Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Nurhasim, Moch. "Hasil Pemilu 2009 dan Perubahan Peta Politik", http://www.politik.lipi.go.id/index.php?option=com_
- Muhtadi, Burhanuddin, "Prospek Partai-Partai Islam dalam Pemilu 2009", [http://islamlib.com / id/artikel/prospek-partai-partai-islam-dalam-pemilu-2009/](http://islamlib.com/id/artikel/prospek-partai-partai-islam-dalam-pemilu-2009/)
- Romli, Lili. 2005. *Islam Yes, Partai Islam Yes*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwardiman. 2009. "Partai Politik:Parpol Baru, yang Bertahan dan yang Tersingkir", dalam *Kompas*, Rabu, 1 Juli 2009.